

STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Agus Hendrayady
e-mail: agushendrayady05081973@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Salah satu provinsi yang mengalami masalah di wilayah perbatasan adalah Provinsi Kepulauan Riau. Ini karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas, masih ada kekurangan pengelolaan sumber daya alam dan potensi baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, penanganan perbatasan yang tidak maksimal dan sektoral, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masih rendah, kurangnya fasilitas keamanan dan infrastruktur dan pertahanan, mengakibatkan lemahnya pengawasan berbagai pelanggaran batas negara, kurangnya integrasi program dan kegiatan untuk pengembangan daerah perbatasan.

Abstract

One of the provinces experiencing problems in the border region is the Riau Islands Province. This is because Riau Islands Province has a very wide border area, there is still a lack of management of natural resources and potential both by the government and the private sector, the handling of the border that is not maximal and sectoral, the level of education and welfare is still low, the lack of security facilities and infrastructure and defense, resulting in weak supervision of various violations of state borders, the lack of integration of programs and activities for the development of border areas.

Keywords: Strategy, Development, Border Areas.

Pendahuluan

Tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk mensejahterakan rakyat atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan apalagi dengan kondisi Indonesia yang sangat beranekaragam. Oleh karena itu, untuk membangun Indonesia harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan. Mulai dari daerah perkotaan sampai daerah pedesaan, daerah pegunungan atau pedalaman maupun yang tinggal di daerah pesisir, sampai pada yang tinggal di perbatasan darat maupun yang tinggal di perbatasan laut.

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu wilayah perbatasan

juga mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan perbatasan, yaitu :

1. Perbatasan memiliki bentangan kawasan yang sangat luas.
2. Pengelolaan potensi sumber daya alam oleh negara maupun swasta masih kurang terutama potensi sumber daya yang ada di laut.
3. Perbatasan belum ditangani secara maksimal dan masih bersifat sektoral.
4. Pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat di negara tetangga seperti Singapura.
5. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan masih minim, dan ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran batas negara.
6. Program dan kegiatan pengembangan kawasan perbatasan belum terpadu.

7. Upaya promosi potensi pembangunan di pulau-pulau kecil yang minim.
8. Peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut masih terbatas.
9. Pasokan listrik belum memadai.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menunjukkan bahwa wilayah perbatasan merupakan masalah yang krusial yang harus mendapatkan perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkecuali wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Demi kemudahan arah dalam penelitian maka penulis membatasi masalahnya yaitu *Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau*.

Untuk mempermudah penelitian, maka dipandang perlu untuk penulis memberikan rumusan masalahnya, sehingga jelas arah dan tujuan pembahasan masalah penelitian tersebut. Adapun perumusan masalahnya adalah : *Bagaimana Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Wlayah Propinsi Kepulauan Riau*.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah *untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan wilayah perbatasan sehingga pembangunan menjadi merata dan dapat mensejahterakan masyarakat*.

Tinjauan Pustaka

Era reformasi yang sedang dilalui bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi kendala dalam pembangunan. Adapun masalah pembangunan menurut Listyaningsih (2014 : 52 - 56), adalah masalah penduduk, masalah pengelolaan sumber daya alam, masalah pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan, masalah perkembangan ekonomi dan pemerataan, masalah institusional dan mentalitas birokrat, masalah ekologi internasional, dan masalah sosial budaya. Pendapat senada juga dikatakan oleh Budianta (2016:1), bahwa dalam

pelaksanaan pembangunan saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, yaitu masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kota-desa, masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya.

Wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal pembangunannya dibandingkan wilayah lain di Indonesia adalah wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan identik dengan daerah perdesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termaginalkan. Dalam Program Nawacita Jokowi – JK pada agenda ketiga berbunyi : *Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan*. Maksudnya adalah bahwa tugas Negara melindungi kepentingan nasional Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan..

Hadi (2017 : 3), menyatakan bahwa isu strategis wilayah perbatasan adalah pertumbuhan ekonomi yang lamban dan pelayanan sosial dasar yang minim, ketersediaan energi yang minim di daerah perbatasan negara, terisolirnya masyarakat karena keterbatasan infrastruktur dasar, akses telekomunikasi yang minim, pengembangan pusat kegiatan strategis nasional yang belum efektif, aktivitas ilegal masih banyak karena pengamanan masih minim, dan masih mementingkan ego sektoral dalam mengelola perbatasan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode riset kepustakaan, yaitu dengan mempergunakan data-data sekunder dari sumber-sumber yang dijadikan objek penelitian, baik buku-buku atau literatur, media elektronik (situs internet), media online, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

Temuan dan Analisis

1. Strategi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani, *Strategos*, yang berarti komandan militer. Dengan arti seperti ini maka strategi sering disamakan dengan taktik, padahal keduanya berbeda. Strategi lebih bersifat dinamis karena merupakan sebuah proses sehingga mengikuti perubahan yang terjadi. Taktik lebih bersifat tetap karena dilakukan pada suatu waktu saja. Selain itu strategi memiliki pilihan alternatif yang lebih banyak daripada taktik. (Nilasari, 2014 : 2 - 3).

Pengertian Strategi menurut Alfred Chandler (dalam Nilasari, 2014 : 3), adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Nawawi, 2005 : 147), Strategi diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.

2. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan adalah suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. (<http://sandyherdians.wordpress.com/2013/04/07/strategi-pembangunan/>). Sementara pendapat lain menyatakan bahwa strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang dijadikan faktor utama (penentu) pada jalannya proses pertumbuhan. (<http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/makalah-strategi-pembangunan.html>).

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan antara lain:

- Kependudukan dan sosial budaya
- Wilayah dan lingkungan
- Sumber daya alam serta persebarannya

- Kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Manajemen nasional
- Kemungkinan pengembangan. (<http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/makalah-strategi-pembangunan.html>).

3. Wilayah Perbatasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang bahwa wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negeri, yang tentunya memiliki nilai strategis yang tidak kalah dengan daerah lainnya. Indonesia yang merupakan negara maritim tentunya memiliki sejumlah perbatasan laut dengan negara tetangga, disamping juga perbatasan darat, bahkan perbatasan udara. Setiap wilayah perbatasan tentunya memiliki persoalannya masing-masing. Kebanyakan persoalan-persoalan tersebut menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan dan persoalan lainnya.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, menyatakan bahwa, "Kebutuhan dasar untuk mereka yang tinggal di perbatasan harus dipenuhi seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kalau kebutuhan hidup mereka itu tidak terpenuhi, maka mereka akan pergi ke negara tetangga". ([Poskotanews.com/2014/02/26/mendagri-minta-bnpp-prioritaskan-penanganan-perbatasan/](http://poskotanews.com/2014/02/26/mendagri-minta-bnpp-prioritaskan-penanganan-perbatasan/).) Jika wilayah perbatasan terus tertinggal dan terabaikan akan muncul masalah yang semakin rumit di kemudian hari.

Wilayah perbatasan tidak seimbang dengan wilayah di negara tetangga. Contoh wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan darat dengan negara tetangga, Kalbar dengan Malaysia, Kaltara dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, serta wilayah Indonesia yang berbatasan laut dengan negara tetangga, Kepulauan Riau dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Kesenjangan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terletak pada masalah ekonomi,

pendidikan, kesehatan, sosial keamanan, bahkan infrastruktur.

Siti Zuhro pengamat Politik dari LIPI mengatakan bahwa : “Persoalan perbatasan selama ini bukan hanya tantangan tapi sudah menjadi ancaman karena ada keinginan mereka untuk bergabung dengan negara tetangganya, dan itu bukan isu baru tapi sudah lama”. ([Poskotanews.com/2015/08/22/tangani-perbatasan-jangan-hanya-wacana/](http://poskotanews.com/2015/08/22/tangani-perbatasan-jangan-hanya-wacana/)).

Pendapat Siti Zuhro ini juga bisa dilihat dari pernyataan Julius, tokoh masyarakat Simantipal, Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara, “Kalau tidak diperhatikan, kami akan angkat kaki ke Malaysia”, pernyataan ini disampaikannya dihadapan ratusan penduduk di Balai Desa Simantipal, pada hari Rabu, 3 Agustus 2016. Ancaman ini disampaikan Julius dengan asumsi jika pemerintah Indonesia tidak (juga) memperhatikan penduduk di wilayah perbatasan tersebut. (<http://nasional.tempo.co/read/792966/tak-diperhatikan-warga-perbatasan-ancam-jadi-wn-malaysia>).

Di bidang sosial keamanan masih sering terjadi *illegal logging* atau penyelundupan kayu, pertambangan liar, dan ini harus diwaspadai. Apalagi untuk wilayah Kepulauan Riau masih sering terjadi *Illegal Fishing, Human Trafficking*, penyelundupan Narkoba, penyelundupan barang-barang ilegal seperti barang kebutuhan pokok, barang elektronik, pakaian bekas. Untuk infrastruktur di wilayah perbatasan pernah dialami sendiri oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada saat masuk perbatasan Indonesia di Entikong melalui Kuching Malaysia Timur, Beliau menyatakan bahwa “Infrastruktur di perbatasan di negara tetangga memang bagus sekali”. ([Poskotanews.com/2014/02/26/mendagri-minta-bnpp-prioritaskan-penanganan-perbatasan/](http://poskotanews.com/2014/02/26/mendagri-minta-bnpp-prioritaskan-penanganan-perbatasan/)).

Masyarakat di wilayah perbatasan lebih mudah mengakses pendidikan dan kesehatan ke negara tetangga. Masyarakat

yang tinggal di wilayah perbatasan saat akan berobat lebih memilih pergi ke negara tetangga. Karena mungkin fasilitas medisnya lebih bagus, dibandingkan dengan yang ada didaerahnya. Contoh masyarakat Kalbar yang terkadang memilih berobat di Kuching Malaysia Timur, masyarakat Batam dan Tanjungpinang (Kepulauan Riau) yang memilih berobat di Singapura dan Malaysia. Bahkan masyarakat Simantipal, Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara, menyatakan bahwa ketika sakit, mereka berobat di Malaysia tanpa biaya, bahkan pemerintah Malaysia memberikan fasilitas jauh lebih baik dibanding Indonesia. Bukan hanya fasilitas kesehatan, salah satu masyarakat Simantipal yang mengaku memiliki KTP Malaysia juga menyatakan bahwa ia mendapat tunjangan pendidikan bagi 2 (dua) orang anaknya yang bersekolah sebesar Rp. 1,5 juta setiap bulan, sehingga ia bisa menerima Rp. 3 juta. (<http://nasional.tempo.co/read/792966/tak-diperhatikan-warga-perbatasan-ancam-jadi-wn-malaysia>).

4. Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Demi mengatasi segala permasalahan yang ada di wilayah perbatasan seluruh Indonesia termasuk wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, maka pemerintah Indonesia telah merancang RPJMN yang akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat RPJMD mulai dari tahun 2010-2015 dan dilanjutkan dengan RPJMD 2016-2021. RPJMD 2010-2015 Provinsi Kepulauan Riau memuat isu – isu strategis daerah yang terkait dengan wilayah perbatasan, yaitu :

1. Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, baik antar kawasan (khususnya Batam dan wilayah lainnya), ibukota dan satelitnya, serta pusat dan *hinterland*-nya.
2. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terdepan dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi

Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan serta pertahanan dan keamanan.

Sedangkan didalam RPJMD 2016-2021 Provinsi Kepulauan Riau telah memuat isu – isu strategis daerah yang terkait dengan wilayah perbatasan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antar daerah cukup tinggi.
2. Pengembangan wilayah perbatasan belum optimal.
3. Pengembangan kemaritiman dan pariwisata.
4. Konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

Keterkaitan antara misi dari RPJMD dengan isu-isu strategis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesenjangan antar daerah cukup tinggi dijabarkan dalam misi kedua (2) yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota, misi keempat (4) yaitu meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), misi kelima (5) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan, serta misi kedelapan (8) yaitu meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Pengembangan wilayah perbatasan belum optimal dijabarkan dalam misi kelima (5) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.
3. Pengembangan kemaritiman dan pariwisata dijabarkan dalam misi

kelima (5) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan, misi ketujuh (7) yaitu meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal, dan misi kedelapan (8) yaitu meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

4. Konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota dijabarkan dalam misi pertama (1) yaitu mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.

Keterkaitan antara RPJMD 2016-2021 yang berfokus dengan wilayah perbatasan dengan isu strategis daerah yang berkaitan dengan wilayah perbatasan tersebut juga tergambar secara jelas didalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, kerukunan, dan nasionalisme di masyarakat, dengan sasaran : terciptanya lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan kondusif serta meningkatnya jiwa nasionalisme masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, dengan sasaran :
 - a. Terhubungnya antar pulau dan antar kabupaten/kota di wilayah provinsi.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian, dengan sasaran

- : meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi).
4. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar masyarakat agar dapat hidup secara layak, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih/minum.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan.
 - c. Meningkatnya rasio elektrifikasi.
 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan.
 6. Menurunkan angka kemiskinan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan sasaran : Menurunnya persentase penduduk miskin.
 7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, dengan sasaran : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaan masyarakat perdesaan.
 8. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan, dengan sasaran : Meningkatnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan.
 9. Meningkatkan kunjungan wisata baik nusantara maupun mancanegara dengan sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
 10. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara merata di seluruh kabupaten/kota dengan sasaran : Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah.
 11. Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan

- dengan sasaran : Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan.
12. Meningkatkan ekspor dan produktivitas industri berbahan baku lokal, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal.
 - b. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan dan sarana dan prasarana perdagangan, serta pengamanan perdagangan.
 13. Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan sasaran :
 - a. Lestarinya sumber daya kelautan dan perikanan.
 - b. Menurunnya kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. (Pemprov Kepri, 2016 :v-9 – v-11).

Berkaitan dengan masalah wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didalam program RPJMD memasukkan program mengenai masalah perbatasan ini, yaitu :

1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
2. Program Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Program Pengembangan, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terdepan.
4. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. (Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).

Adapun rencana induk pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Memacu peningkatan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat perbatasan yang sinergis dengan perekonomian wilayah negara tetangga dan wilayah lainnya.
2. Meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah perbatasan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.

3. Mengembangkan SDM sebagai modal penggerak pembangunan wilayah perbatasan.
4. Membuka isolasi dan keterbelakangan wilayah perbatasan (fisik maupun informasi), dengan membangun infrastruktur yang memadai.
5. Mengelola sumberdaya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem kerjasama pembangunan antar pemerintah dan pemerintah daerah maupun antar pelaku usaha. (Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).

Sementara itu, strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan.
2. Membangun dengan pendekatan kesejahteraan.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
6. Meningkatkan kerjasama pembangunan. (Bappeda Provinsi Kepulauan Riau).

Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan keamanan (*security*), dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah pendekatan tembok dan mangkok. Pendekatan keamanan (*security*) pada dasarnya untuk memelihara batas wilayah kedaulatan NKRI dan pertahanan keamanan negara. Bukan membatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di pulau terdepan. Sedangkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) bertujuan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan yang berkelanjutan. Dengan melindungi masyarakat untuk memanfaatkan potensi ekonomi di pulau terdepan.

Tahun 2011, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh dana dari pemerintah pusat senilai Rp. 100 miliar untuk pembangunan daerah perbatasan. Sementara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp. 232 miliar melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di tahun 2011, dana tidak digunakan untuk hal tertentu saja, tetapi juga untuk kebutuhan yang lain, seperti jalan, listrik dan sumber air bersih di pulau-pulau yang kesulitan mendapatkannya. Untuk anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi akan dialokasikan dengan sasaran mengentaskan warga dari kemiskinan dan memberdayakan masyarakat pulau-pulau terluar, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan budidaya rumput laut, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan. Dengan konsep ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan pulau-pulau. Sektor kelautan menjadi prioritas karena Provinsi Kepulauan Riau berada di perbatasan.

Program ini bersifat permanen serta harus dilaksanakan di 19 pulau terdepan di Provinsi Kepulauan Riau, artinya bahwa di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di pulau-pulau terdepan harus memiliki aktivitas ekonomi dan sosial. Pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp. 1,618 Triliun pada tahun 2017 untuk membangun wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen pemerintah ini diawali dengan adanya pencanangan program Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Natuna. Adapun tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kebijakan dan program kegiatan pembangunan wilayah perbatasan negara. Termasuk juga dalam rangka peninjauan lapangan atas masalah dan kendala pembangunan daerah, untuk mencari solusinya. (<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/892215-proyek-perbatasan-di-kepulauan-riau->

berbiaya-rp1,61-triliun). Dana sebesar ini dapat digunakan dalam berbagai dimensi pembangunan, salah satunya adalah dimensi pemerataan dan antar wilayah, dimana pembangunan wilayah perbatasan di Kepulauan Riau diarahkan pada pembangunan untuk mendukung wilayah perbatasan seperti percepatan rehabilitasi rumah layak huni, pasar, sekolah, puskesmas, Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), upaya penyelesaian batas negara serta peningkatan elektrifitas terutama di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil melalui Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) serta Pengembangan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Listrik dan pembangunan pelabuhan/dermaga di wilayah perbatasan. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang strategis yang perlu didukung dalam hal konektivitas. Prioritas dalam hal konektivitas ditujukan untuk mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan KPBPB Batam yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dalam hal konektivitas laut, beberapa pembangunan pelabuhan dan kapal penyeberangan juga menjadi prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas untuk mengurangi kesenjangan intrawilayah dan antarwilayah. Tahun depan diharapkan bisa rampung pembangunan beberapa aspek lainnya, misalnya aspek sosial dan ekonomi. (<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/892215-proyek-perbatasan-di-kepulauan-riau-berbiaya-rp1,61-triliun>).

Kota Batam juga termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Harapan yang ditaruh pada Batam adalah agar Batam menjadi daerah industri, pariwisata, perkapalan, dan jasa. Apalagi Batam berada pada jalur pelayaran Internasional, Selat Malaka dan Selat Singapura. Dengan

demikian Batam dapat dimanfaatkan lokasinya yang berbatasan dengan negara asing tersebut dengan menjadi andalan pembangunan dan perekonomian nasional pada umumnya dan Kepulauan Riau khususnya. Sehingga memang sudah seharusnya Batam menjadi lebih maju, bukan justru tertinggal daripada daerah lain.

Kota Batam dirancang menjadi kota industri, pariwisata, perkapalan, dan jasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko : “Pengelolaan potensi maritim harus menjadi prioritas dan perlu kerja ekstra, khususnya di wilayah perbatasan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, yakni Kota Batam”. (<http://antarakepri.com/berita/24757/batam-manfaatkan-perbatasan-sebagai-kelebihan>). Lebih lanjut Triyono Budi Sasongko menyatakan bahwa : “Dipandang perlu terobosan dalam pengelolaan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga terwujudnya 3 (tiga) domain utama, yaitu penegasan batas wilayah negara, keamanan batas wilayah negara dan pembangunan daerah batas wilayah negara, kokohnya NKRI dan harkat martabat negara”. (<http://antarakepri.com/berita/24757/batam-manfaatkan-perbatasan-sebagai-kelebihan>).

Bentuk-bentuk lain dari pembangunan di wilayah perbatasan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain program Tol Laut, hal ini dilakukan karena Kepulauan Riau wilayahnya banyak laut. Kebijakan lain yang dibuat pada masa pemerintahan Jokowi – JK adalah terbitnya PP 105 yang memudahkan masuknya kapal-kapal yard asing ke Indonesia, hal ini disampaikan oleh Kadis Kominfo Pemprov Kepri Guntur Sakti. Lebih lanjut beliau mengatakan : “Saat ini ada 4000 yard yang parkir di Singapura, itu adalah pasar besar di depan mata kita. Selama ini, mereka masih bermain di Filipina dan daerah lain. Padahal kita punya destinasi yang jauh lebih luas dan indah, kita juga punya jalur equator di Lingga. Disamping kebijakan

bebas visa masuk ke Indonesia, dimana dengan kebijakan bebas visa masuk ini Kepri mendapat rezeki nomplok karena memiliki 17 pelabuhan ferry internasional.” (<https://m.batamtoday.com/berita99783-Pembangunan-di-Perbatasan-Kepri-Masih-Hadapi-Berbagai-Kendala.html>).

Di bidang infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur kelistrikan PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menghadapi kendala, terutama untuk wilayah-wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan kondisi geografis Kepulauan Riau yang mayoritas adalah laut, faktor cuaca dan iklim yang tidak menentu dan tidak ada fasilitas bongkar muat pelabuhan. Saat ini wilayah-wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang telah teraliri listrik baru 77,34% dengan target di tahun 2019 telah teraliri 100%.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya upaya pemerintah pusat tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- b. Pembangunan wilayah perbatasan memerlukan koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Badan Daerah Pengelola Perbatasan (BDPP), sehingga wilayah dapat terjaga dan terkelola dan dapat dibanggakan sebagai beranda terdepan NKRI.
- c. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan wilayah perbatasan adalah dengan menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan, membangun dengan pendekatan kesejahteraan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perlindungan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (SDM), meningkatkan kerjasama pembangunan.

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan harus mencakup semua wilayah baik darat maupun laut, dari pegunungan sampai perbatasan, dari pedalaman sampai dengan pesisir.
2. Untuk membangun wilayah perbatasan sangat dibutuhkan kerjasama yang bukan hanya semangat “sesaat” tetapi harus dituntaskan hingga masyarakat tidak lagi merasakan adanya diskriminasi terhadap pembangunan yang bersifat “Jawa *Centrist*”, tetapi bersifat “Indonesia *Centrist*”.

Segala bentuk rogram pembangunan terutama untuk wilayah perbatasan harus terus dilakukan dan disertai dengan anggaran yang memadai

Daftar Pusataka

- Budianta, Aziz, 2016, *Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia*, <http://www.academia.edu/5356056/Pertahanan>. Didownload pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017, pukul 11.30 Wib.
<http://dewirzain.blogspot.com/2013/05/makalah-strategi-pembangunan.html>. Didownload pada hari Senin, 08 Oktober 2018, pukul 15.25 Wib.
<http://nasional.tempo.co/read/792966/tak-diperhatikan-warga-perbatasan-ancam-jadi-wn-malaysia>. Didownload pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 17.40 Wib.
<https://harryhidayat.wordpress.com/2013/04/21/strategi-pembangunan/>. Didownload pada hari Senin, 08 Oktober 2018, pukul 15.30 Wib.
<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/892215-proyek-perbatasan-di-kepulauan-riau-berbiaya-rp1.61-triliun>. Didownload pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 18.08 Wib.
<http://antarakepri.com/berita/24757/batam-manfaatkan-perbatasan-sebagai-kelebihan>. Didownload pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 22.42 Wib.

<https://m.batamtoday.com/berita99783-Pembangunan-di-Perbatasan-Kepri-Masih-Hadapi-Berbagai-Kendala.html>.
Didownload pada hari Minggu, 29 Oktober 2017, pukul 18.03 Wib.

Listyaningsih, 2014, *Administrasi Pembangunan : Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Nawawi, Hadari, 2005, *Manajemen Strategik : Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nilasari, Senja, 2014, *Manajemen Strategi itu Gampang : Untuk Pemula & Orang Awam*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Poskotanews.com/2014/02/26/mendagri-minta-bnpp-prioritaskan-penanganan-perbatasan/.
Didownload pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017, pukul 11.44 Wib.

Poskotanews.com/2015/08/22/tangani-perbatasan-jangan-hanya-wacana/.
Didownload pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017, pukul 11.12 Wib.